

RELASI SOSIAL DAN RESILIENSI KOMUNITAS PETANI KORBAN ERUPSI GUNUNG BERAPI DI KAWASAN RELOKASI

Social Relation and Resilience of Farming Community Affected by Volcano Eruption in the Relocation Area

Sri Suharyono^{1*}, Nurmala K. Panjaitan², Saharuddin²

¹Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,
Jalan Tentara Pelajar No. 3B Cimanggu, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia

²Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor,
Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16002, Jawa Barat, Indonesia

*Korespondensi penulis. E-mail: srisuharyono@gmail.com

Naskah diterima: 26 Desember 2019

Direvisi: 18 April 2020

Disetujui terbit: 11 Juni 2020

ABSTRACT

Volcanic eruption victims to be relocated deal with two sequential shaking conditions, namely when a volcano erupts and when the community is relocated. This paper reviews the literatures on social relations and community resilience to the natural disasters, especially volcanoes, as well as how the relocation policy is implemented for farmer community victims. The ability of the community to rise from adversity due to natural disasters and to deal with challenges of a new life in the relocation area is determined by existing resources and their adaptive capacity. The more various the resources and the stronger the adaptive the community, the community will be more resilient. Social relations will further accelerate community resilience. Relocation is expected to improve the community's life, but in fact in several places it raises new problems. Some considerations are needed for relocation such as location, natural and social environment, and social ties in the community. It is essential to design an efficient, effective policy to deal with natural disasters which includes sustainable livelihood and social systems.

Keywords: *community resilience, disaster, relocation, social relation*

ABSTRAK

Komunitas korban erupsi gunung berapi yang direlokasi dihadapkan pada dua kondisi guncangan yang berurutan, yakni pada saat terjadinya erupsi dan saat komunitas tersebut direlokasi. Tulisan ini mengulas sejumlah literatur yang terkait dengan relasi sosial, resiliensi komunitas terhadap bencana alam yang mereka hadapi, khususnya gunung berapi. Ulasan juga mencakup bagaimana kebijakan relokasi yang diterapkan bagi komunitas petani korban bencana alam. Kemampuan komunitas untuk bangkit dari keterpurukan akibat bencana alam dan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang baru di kawasan relokasi ditentukan oleh kekuatan sumber daya dan kapasitas adaptif yang dimiliki oleh komunitas. Semakin bervariasi sumber daya dan semakin kuat kapasitas adaptif yang dimiliki oleh komunitas maka menentukan sejauh mana resiliensi komunitas itu berlangsung. Relasi sosial dalam bentuknya yang asosiatif semakin mempercepat terjadinya resiliensi komunitas. Relokasi yang diharapkan mampu memperbaiki kehidupan komunitas dengan menjauhkannya dari ancaman bencana yang akan datang, justru di beberapa tempat menimbulkan persoalan. Diperlukan pertimbangan dalam pelaksanaan relokasi seperti lokasi, lingkungan alam dan sosial, dan juga ikatan sosial dalam komunitas. Perlu dirumuskan kebijakan yang efektif dan efisien untuk penanggulangan dampak bencana alam yang meliputi sistem penghidupan dan sistem sosial secara berkelanjutan.

Kata kunci: *bencana, relasi sosial, relokasi, resiliensi komunitas*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang rawan terkena bencana alam karena terletak di kawasan cincin api (*ring of fire*). Kondisi geologi Indonesia dilingkari gunung berapi yang terbentang dari Sumatera hingga Nusa

Tenggara dan Maluku. Keberadaan lingkaran api membuat wilayah sekitar rentan akan terjadinya bencana erupsi gunung berapi (Hartini 2017).

Bronto (2001) dalam Dibyosaputro et al. (2016) menjelaskan potensi bahaya yang ditimbulkan gunung api yang mungkin terjadi

dan menimbulkan banyak kerugian di antaranya jatuhnya piroklastik, jatuhnya awan panas, hujan abu, banjir lahar, dan aliran lava. Material yang keluar pada saat gunung berapi mengalami erupsi berpotensi merusak tanaman pertanian selain tentunya juga berbahaya bagi manusia. Ditambah lagi kesiapsiagaan penduduk yang rendah menyebabkan risiko terkena dampak erupsi gunung api menjadi tinggi (Marfai et al. 2012).

Letusan gunung berapi dapat berdampak pada kerusakan material, korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta dampak psikologis. Sebagai contoh, Nuryani et al. (2011) melaporkan bahwa erupsi Gunung Merapi tahun 2010 mengakibatkan kerusakan dan kerugian material masyarakat di sektor pertanian, peternakan serta hortikultura di wilayah D I Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bahkan, dalam tahap tertentu, dampak psikologis dapat menyebabkan terjadinya *post traumatic stress disorder* (PTSD). Schiraldi (2009) mendefinisikan PTSD sebagai respons individu terhadap suatu peristiwa/suatu kondisi yang dapat menimbulkan gejala-gejala, berupa *reexperiencing* (teringat kembali), *avoidance* (penghindaran), *hyperarousal* (peningkatan kewaspadaan berlebihan). Sementara, Somasundaram dan Sivayokan (2013) menyebutkan bahwa bencana alam seringkali meninggalkan gejala sisa seperti gangguan psikososial dan psikiatri di tengah-tengah masyarakat yang terkena dampak. Penanganan bagi pihak yang terdampak, tidak sekedar bersifat fisik tetapi juga psikologis.

Kawasan gunung berapi meskipun sarat dengan potensi bahaya dan kerawanan yang tinggi, namun di sisi lain membawa keuntungan. Kawasan di sekitar gunung berapi merupakan daerah yang subur dan selama ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Studi Thouret (1999) dalam Dibyosaputro et al. (2016) menyebutkan bahwa gunung berapi merupakan suatu bentuk lahan yang secara spesifik memiliki ancaman bencana. Namun, lingkungan di sekitar gunung berapi memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang menyebabkan banyak penduduk yang tinggal di sekitarnya.

Penduduk yang tinggal di kawasan lereng gunung berapi banyak yang mengandalkan penghidupan dari sektor pertanian. Kondisi ini memiliki konsekuensi yaitu dampak dari erupsi gunung berapi sangat berpengaruh pada kehidupan komunitas, terutama komunitas petani yang menggantungkan hidup dari usaha pertanian yang ditopang oleh kesuburan alam lereng gunung berapi. Potensi kerugian sangat

mungkin dialami oleh komunitas petani pasca-bencana, seperti hilangnya lahan pertanian sebagai tempat pencaharian dan hilangnya pekarangan yang biasanya juga sebagai kegiatan produksi (Meiarti et al. 2016). Lahan dan pekarangan merupakan aset ekonomi bagi komunitas petani untuk menjalankan usaha taninya.

Dampak erupsi gunung berapi yang paling besar adalah hancurnya sebuah wilayah pemukiman masyarakat beserta lahan penghidupannya yang menyebabkan komunitas yang tinggal di dalamnya harus direlokasi. Kejadian erupsi Gunung Sinabung yang berada di Sumatera Utara, menyebabkan beberapa komunitas yang tinggal di lereng gunung berapi tersebut harus direlokasi (Pandia et al. 2016). Peristiwa yang sama juga terjadi pada Gunung Merapi yang berada di Yogyakarta mengalami erupsi pada tahun 2010, menyebabkan beberapa komunitas yang tinggal di lereng gunung berapi tersebut juga harus direlokasi (Bawole 2015).

Relokasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu petani untuk terhindar dari risiko bencana sekaligus untuk menata kehidupan masa depan korban bencana. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah adalah dengan kebijakan relokasi. Kebijakan relokasi merupakan upaya pemindahan penduduk dari tempat tinggal semula ke tempat yang lebih aman dari ancaman bencana dengan mengambil lokasi yang pada umumnya tidak jauh dari tempat tinggal semula (di sekitar gunung berapi). Tujuannya supaya anggota komunitas tidak menghadapi kesulitan atau mudah melakukan adaptasi terkait dengan kegiatan atau aktivitas dengan tempat tinggal lama.

Relokasi adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya menambah kemiskinan. Program relokasi memang tidak sederhana karena terkait dengan berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, status lahan, aktivitas sosial ekonomi dan lain sebagainya. Keberadaan komunitas di kawasan baru yang sangat berbeda kondisinya dengan lokasi asal komunitas, baik secara fisik maupun sosial mungkin akan melahirkan permasalahan baru yang semakin kompleks serta memerlukan upaya lebih ekstra untuk mendapatkan solusi yang diterima semua pihak. Di sisi lain, relokasi justru bisa menimbulkan dampak baru bagi komunitas yang direlokasi. Relokasi menjadi 'bencana' baru pascabencana alam terjadi. Bagaimana kemudian upaya adaptasi yang dilakukan oleh komunitas korban bencana alam

yang direlokasi itu menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji. Adaptasi merupakan suatu bentuk resiliensi komunitas dalam upaya mengembalikan kehidupan komunitas seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

Relasi sosial yang terjadi dalam komunitas masyarakat yang terkena dampak bencana alam akan memengaruhi bagaimana resiliensi komunitas tersebut dalam menghadapi bencana. Resiliensi merupakan kapasitas adaptif dari individu/komunitas untuk menyerap gangguan, mengalami perubahan, dan mempertahankan fungsi, struktur dan identitasnya. Tulisan ini merupakan review dari sejumlah literatur yang terkait dengan relasi sosial dan resiliensi masyarakat (petani) dalam menghadapi bencana alam yang mereka hadapi, khususnya gunung berapi dan kebijakan sesudahnya. Dengan ulasan ini diharapkan dapat dirumuskan strategi/kebijakan yang efektif dan efisien untuk penanggulangan dampak bencana alam di kalangan komunitas petani.

KONSEP RELASI SOSIAL

Relasi sosial merupakan hasil dari interaksi yang sistematis antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial yang sistematis adalah yang terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama. Dalam suatu relasi sosial terdapat hubungan timbal balik antar-individu satu dengan yang lain dan saling memengaruhi. Spradley dan McCurdy (1975) menyebutkan relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antarindividu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola hubungan, yang disebut juga sebagai pola relasi sosial.

Relasi sosial diawali dengan adanya interaksi sosial yang merupakan kunci terjadinya sebuah peristiwa sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, maka kehidupan dalam masyarakat tidak akan terjadi. Secara konseptual, ada beberapa definisi tentang interaksi sosial. Gillin dan Gillin (1954) dalam Sumarti (2015) menjelaskan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial bisa terjadi antarsatu orang dengan orang lain dalam satu komunitas yang sama, bisa pula terjadi antarsatu orang dengan orang lain dalam komunitas yang berbeda, dan interaksi bisa pula terjadi antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Terjadinya

interaksi sosial membutuhkan minimal dua orang atau lebih. Interaksi sosial terjadi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu (Soelaeman 2011).

Calhoun et al. (1994) dalam Sumarti (2015) menyatakan bahwa interaksi sosial dimaknai sebagai proses dimana orang mengorientasikan dirinya pada orang lain dan bertindak sebagai respons terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan pengertian ini, proses interaksi sosial terjadi dengan melibatkan orang lain yang di dalamnya terdapat unsur yang saling memengaruhi. Oleh karena itulah setiap interaksi sosial yang terjadi memiliki bisa dipastikan memiliki tujuan tertentu. Selain itu, interaksi sosial juga dibatasi oleh norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sebuah interaksi sosial akan terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi (Soekanto 2010).

Relasi sosial dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni relasi sosial yang bersifat asosiatif dan relasi sosial yang bersifat disosiatif. Relasi sosial yang bersifat asosiatif merupakan bentuk relasi sosial yang mengarah pada keharmonisan, keintiman hubungan. Relasi sosial asosiatif ini bersifat membangun serta saling menunjukkan peran dan kontribusi yang positif antar pihak yang berelasi. Bentuk relasi sosial yang bersifat asosiatif meliputi: kerja sama (*cooperation*), akomodasi dan asimilasi.

Kerja sama merupakan bentuk relasi sosial asosiatif yang pertama. Cooley dalam Sujarwanto (2012) menyebutkan bahwa kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya kerja sama menurut Chitambar (1973) dalam Sumarti (2015) antara lain; motivasi atau kepentingan pribadi, kepentingan umum, motivasi altruistic (semangat pengabdian, ibadah, alasan kemanusiaan, motivasi tanpa pamrih, dan sebagainya) dan tuntutan situasi.

Akomodasi (*accomodation*) diartikan sebagai suatu keseimbangan (*equilibrium*) norma-norma sosial atau nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Keseimbangan terjadi oleh proses kesepakatan dan penyesuaian antarorang-perorangan atau antarkelompok dengan kelompok dalam masyarakat untuk mengurangi pertentangan yang ada sebagai akibat dari perbedaan paham atau hal lainnya. Terjadinya akomodasi akan mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, untuk memungkinkan terjadinya kerja sama, serta mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah. Asimilasi (*assimilation*) merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya upaya-upaya mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masyarakat, baik itu antar orang-perorangan ataupun antarkelompok masyarakat. Asimilasi juga meliputi usaha mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama. Asimilasi akan terbentuk jika terdapat beberapa faktor pendorong seperti toleransi, kesempatan-kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan-persamaan dalam unsur kebudayaan, perkawinan campuran dan adanya musuh bersama dari luar (Soekanto 2010)

Kebalikan dari relasi sosial asosiatif adalah relasi sosial disosiatif. Relasi sosial disosiatif merupakan relasi sosial yang bersifat merusak atau saling menunjukkan peran dan kontribusi yang negatif antarpihak yang berinteraksi. Interaksi sosial disosiatif mengarah pada ketidak harmonisan dalam hubungan antarorang-perorang ataupun antarkelompok dalam masyarakat. Lebih jauh, interaksi sosial disosiatif bahkan bisa sampai mengarah pada terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Bentuk interaksi sosial disosiatif meliputi : persaingan, kontradiksi, dan pertentangan atau konflik.

Relasi sosial yang ada dalam sebuah komunitas ataupun antarkomunitas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Soekanto (2010) menyebutkan ada empat faktor yang berpengaruh, yakni imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Sedangkan Mollie dan Smart dalam Wibowo (2016) menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi intensitas interaksi sosial terdapat tiga aspek, yakni: aktivitas bersama, identitas kelompok dan imitasi. Aktivitas bersama dapat diartikan bagaimana individu menggunakan waktu, terutama untuk aktivitas secara bersama.

Identitas kelompok merupakan sebuah proses yang dilakukan individu dalam mengidentifikasi dirinya ke dalam kelompok dan menganggap kelompok lainnya adalah sebagai lawan. Imitasi adalah seberapa besar individu meniru pandangan dan pikiran-pikiran orang lain.

Terbentuknya relasi sosial dalam masyarakat, membutuhkan suatu sarana atau saluran. Saluran interaksi sosial yang merupakan lembaga atau wadah berbagai aktivitas sosial individu terhadap individu lain, individu terhadap kelompok atau kelompok terhadap kelompok lain dalam masyarakat, baik berupa aktivitas yang spontan ataupun yang direncanakan (Sujarwanto 2012). Saluran interaksi sosial dapat berbentuk lembaga formal dan lembaga nonformal. Lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah seperti RT/RW, Kelurahan, BPD dan lain sebagainya yang memiliki aspek legalitas formal. Sementara itu, lembaga nonformal bisa berbentuk seperti kelompok pengajian (keagamaan), kelompok arisan, kelompok tani/ternak, dasa wisma, dan lain sebagainya.

Relokasi bagi korban bencana alam, akan berdampak pada relasi sosial yang ada komunitas dan juga masyarakat. Selain berdampak pada relasi sosial, relokasi komunitas korban bencana alam ke dalam lokasi yang baru bisa juga berdampak pada perubahan dalam ikatan sosial dalam komunitas tersebut. Relokasi bisa mengakibatkan pergeseran komunitas dari yang semula bersifat paguyuban (*gemeinschaft*) menjadi komunitas yang bersifat patembayan (*gesselschaft*). Relokasi komunitas korban bencana alam tentunya juga disertai dengan kelembagaan-kelembagaan yang mengaturnya. Apabila kelembagaan ditempat semula tidak mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan di kawasan yang baru, dimungkinkan akan lahir kelembagaan-kelembagaan baru yang mewadahi kehidupan komunitas di kawasan yang baru ditempati. Begitupun dengan ikatan-ikatan sosial yang terjadi di masyarakat, perpindahan tempat tinggal ke kawasan yang baru tentunya akan berdampak juga pada masalah pembagian kerja. Dalam hal ini, komunitas korban bencana erupsi merapi dalam menjalani kehidupan di kawasan relokasi, dimungkinkan juga mengalami perubahan.

Studi empiris terkait dengan interaksi sosial di kalangan pengungsi korban letusan Gunung Merapi dilakukan oleh Suprianto (2012). Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya bentuk adaptasi sosial pada pengungsi di hunian sementara (Huntara) Jenggala. Terjadi interaksi

sosial antarpengungsi yang dalam prosesnya terbentuk melalui solidaritas sosial. Adaptasi para pengungsi merupakan proses penyesuaian diri dengan lingkungan baik secara sosial dan fisik setelah bencana erupsi Merapi. Melalui proses sosial, maka disadari maupun tidak disadari telah membentuk solidaritas sosial. Interaksi yang semakin solid membawa mereka pada solidaritas organis yang terwujud dalam kelompok sosial. Proses adaptasi selain mengandung faktor pendorong dan penghambat juga memengaruhi pranata sosial walaupun tidak secara menyeluruh. Perubahan yang sederhana ini juga membawa dampak baik dalam proses sosial itu sendiri maupun dalam interaksi sosialnya.

Sementara dalam kasus interaksi sosial di daerah transmigran (Demakota et al.2017) menunjukkan bahwa kerja sama yang terjadi antara transmigran dan masyarakat adat terjalin sedemikian harmonis yang dalam kehidupan sehari-hari telah mencerminkan bentuk asimilasi/pencampuran yang luas timbul karena kesadaran bahwa mereka memiliki kepentingan bersama, baik secara individu maupun secara kelompok walaupun memiliki sadar mereka memiliki latar belakang etnis budaya yang berbeda. Hal ini memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan sosial masyarakat transmigrasi dan masyarakat adat dalam hidup berdampingan secara baik. Namun demikian, persaingan terjadi antara transmigran dan penduduk asli ditandai dengan adanya persaingan kepemilikan lahan / kecemburuan sosial tanah dan persaingan antara pemuda desa namun tidak sampai ada persaingan atau ancaman kekerasan. Akomodasi atau bekerja untuk mengakhiri perselisihan atau konflik antara para pihak yang berkonflik yaitu antara transmigran dengan penduduk asli dapat dipecahkan baik melalui keluarga atau dengan bantuan penduduk desa dan pejabat pemerintah.

KOMUNITAS PETANI DAN KOHESI SOSIAL

Komunitas merupakan bagian dari masyarakat luas yang memiliki unsur yang khas, diantaranya adalah memiliki wilayah teritorial sebagai tempat komunitas tersebut berada. Setiap anggota komunitas seakan-akan terpadu dan terpadu pada tanah (*territorium*) dimana mereka berada (Mutakin dan Pasya 2003). Hal yang sama juga disebutkan oleh Norris et al. (2007) bahwa komunitas adalah suatu kesatuan yang mempunyai batas geografi yang sama dan berbagi nasib yang sama. Komunitas ditandai

oleh keterlibatan individu, afeksi, dan pembentukan kebiasaan yang tahan lama. Komunitas terdiri dari orang-orang sadar bahwa memang mereka harus hidup bersama dan saling tergantung satu sama lain (Laeyendecker 1983). Apabila anggota-anggota di dalam sebuah wilayah tersebut mampu hidup bersama serta dapat memenuhi kepentingan hidup mereka maka itulah yang dinamakan komunitas (Nasdian 2006). Komunitas adalah suatu kesatuan yang unik yang mempunyai kebutuhan lokal, pengalaman, sumber daya dan ide-ide tentang pencegahan, perlindungan, respons dan pemulihan dari berbagai tipe bencana tersendiri (Panjaitan et al. 2016). Istilah komunitas bisa merujuk pada warga desa ataupun suku tertentu yang tinggal di suatu wilayah.

Kohesi sosial merupakan ikatan sosial yang terjalin antarindividu atau kelompok dalam masyarakat atau komunitas. Kekuatan kohesi sosial bergantung pada intensitas interaksi sosial yang terjadi antaranggota komunitas. Kuat lemahnya kohesi sosial komunitas berjalan seiring dengan proses homogenisasi cita-cita kelompok dan berpengaruh langsung terhadap kelangsungan kehidupan bersama. Kekuatan kohesi sosial yang ada dalam suatu komunitas di antaranya berdasarkan ikatan kefamilian, klan dan genealogi dalam bingkai ke-etnikan (Hasyim 2015). Kohesi sosial dalam komunitas juga terbentuk karena adanya kesamaan unsur yang ada dalam anggota komunitas, seperti kesamaan mata pencaharian (petani), bisa juga kesamaan adat dan budaya, agama atau unsur-unsur lainnya. Masyarakat yang tinggal di kawasan lereng gunung berapi, mayoritas adalah komunitas perdesaan yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Kohesi sosial dalam komunitas ini yang nantinya akan berpengaruh pada resiliensi komunitas dalam menghadapi guncangan akibat bencana atau penanganan pascabencana (relokasi).

Kohesi sosial komunitas ditentukan juga oleh sistem sosial yang ada dalam komunitas. Sistem sosial yang terdapat dalam komunitas petani lereng gunung berapi dibangun oleh berbagai komponen, seperti komponen ekonomi, sosial dan juga budaya yang saling memiliki keterkaitan. Tidak jarang pula komunitas petani di perdesaan secara genealogis masih diikat oleh unsur kekerabatan. Hal inilah yang kemudian menjadikan komunitas petani perdesaan itu memiliki karakteristik yang khas. Komunitas perdesaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan komunitas lainnya seperti komunitas perkotaan. Komunitas perdesaan memiliki latar belakang sama, mulai

dari tingkat pendidikan yang setara, afiliasi keagamaan dan etnik masyarakat tertentu yang berada dalam komunitas tersebut (Kulig et al. 2008). Homogenitas inilah yang membuat kohesi sosial pada komunitas perdesaan relatif lebih tinggi daripada komunitas yang lain. Homogenitas tersebut juga mampu membentuk rasa kepedulian antar anggota komunitas dan berbagai proses sosial yang asosiatif masih sering ditemukan di komunitas perdesaan.

Kohesi sosial yang terjadi di masyarakat dikategorikan menjadi dua tipologi, yakni kohesi sosial intramasyarakat dan kohesi sosial antarmasyarakat (Hasyim 2015). Kohesi sosial intramasyarakat terbentuk melalui mekanisme pembentukan sosio-kultur dalam masyarakat tunggal (*single society*) yang biasanya didorong oleh kesadaran kekerabatan, sedangkan kohesi sosial antarmasyarakat terbentuk melalui pertemuan sosial lintas masyarakat yang biasanya terbentuk karena kepentingan pragmatis-ekonomis.

Kohesi sosial adalah sebuah konsep yang apabila ditelusur berawal dari konsep Emile Durkheim tentang solidaritas sosial sebagai akibat adanya pembagian kerja di dalam masyarakat. Pembagian kerja di dalam masyarakat menyebabkan terjadi pergeseran solidaritas sosial dari solidaritas mekanik kepada solidaritas organik. Solidaritas mekanik yang diindikasikan dengan adanya aktor yang kuat dalam masyarakat, lalu terdapat solidaritas organik yang diindikasikan dengan saling bergantungnya individu maka akan terbentuk suatu kohesi sosial dengan sendirinya. Forrest dan Kearns (2001) dalam Nisa dan Juneman (2012) menyatakan bahwa ranah-ranah kohesi sosial meliputi (1) nilai-nilai bersama dan sebuah budaya warga (*civic culture*), (2) keteraturan sosial dan kendali sosial, (3) solidaritas sosial, (4) jejaring sosial dan modal sosial, serta (5) kelekatan dan identifikasi pada tempat (*place attachment and identity*)

Kohesi sosial di dalam masyarakat meliputi beberapa unsur. Beal et al. (2003) dalam Khadijah (2015) menyebutkan bahwa kohesivitas kelompok terdiri dari interaksi interpersonal, komitmen tugas dan kebanggaan kelompok. Komitmen yang diberikan oleh individu yang tergabung dalam kelompok di antaranya mengikuti kegiatan kelompok dan lain-lainnya. Kohesivitas yang terjadi di dalam masyarakat sejatinya mampu memengaruhi suasana masyarakat dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Kohesivitas yang telah terbentuk tentunya tidak begitu saja tercipta dan mudah dipertahankan, akan tetapi ada proses. Gibson (2003) dalam Khadijah (2015)

mengungkapkan bahwa kohesivitas kelompok adalah kekuatan ketertarikan anggota yang tetap pada kelompoknya daripada terhadap kelompok lain. Mengikuti kelompok akan memberikan rasa kebersamaan dan semangat dalam menjalani aktivitas menuju tempat masing-masing.

Munandar (2001) dalam Yuasidha (2014) menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kohesi sosial suatu kelompok masyarakat di antaranya: (1) lamanya waktu berada bersama kelompok; (2) penerimaan diawal, semakin sulit seseorang diterima didalam suatu kelompok sebagai anggota, makin kohesif kelompok tersebut; (3) ukuran kelompok; (4) adanya ancaman eksternal; (5) produktivitas kelompok. Menurut Myers (2010) kohesi sosial merupakan perasaan "*we feeling*" yang mempersatukan setiap anggota menjadi satu bagian. Rasa memiliki tersebut juga dapat membentuk kohesi sosial antarindividu dalam suatu komunitas. Rasa memiliki ini membuat individu menyadari bahwa ia merupakan bagian dari komunitas.

Kohesi sosial yang tinggi terdapat pada masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya yang sama serta *sense of community* (Ramadhan et al. 2015). *Sense of community* merupakan perasaan anggota masyarakat yang merasa saling memiliki, perasaan bahwa dirinya penting bagi komunitasnya, memiliki kepercayaan bersama bahwa kebutuhan anggota akan terpenuhi dan terdapat komitmen untuk bersama (McMillan dan Chavis 1986).

RESILIENSI KOMUNITAS DALAM MENGHADAPI DAMPAK BENCANA ALAM

Resiliensi Komunitas

Dugan dan Coles (1991) mengemukakan resiliensi sebagai kepastian untuk pulih dan bangkit kembali dari kekecewaan, hambatan dan kemunduran. Adapun Alvord dan Grados (2005) menjelaskan resiliensi merupakan keterampilan, atribut, dan kemampuan yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan penderitaan, kesulitan dan tantangan. Istilah resiliensi sebetulnya berasal dari ilmu fisika, yang berarti "bangkit kembali".

Istilah resiliensi digunakan untuk menunjukkan kemampuan kembali dengan cepat kepada kondisi sebelumnya. Resiliensi sendiri merupakan suatu konsep yang berasal dari disiplin ilmu ekologi (Gallopini 2006). Definisi dari resiliensi sangat beragam, seperti misalnya

definisi resiliensi yang dikemukakan oleh Holling (1973) dalam Gallopin (2006) yang menyebutkan bahwa resiliensi sebagai pengukuran dari kegigihan sistem dan kemampuan suatu sistem sosial kemasyarakatan untuk menyerap perubahan dan gangguan serta dapat mempertahankan hubungan-hubungan yang sama antarpopulasi dan variabel-variabel negara. Sementara itu, Adger (2000) menjelaskan resiliensi sebagai kemampuan dari kelompok-kelompok atau komunitas untuk mengatasi tekanan dan gangguan eksternal yang muncul sebagai hasil dari perubahan sosial, politik, dan lingkungan. Secara lebih ringkas, Van Breda (2001) menyebutkan bahwa teori resiliensi membahas kekuatan yang ditunjukkan oleh orang dan sistem yang memungkinkan mereka untuk mengatasi kesulitan. Intinya adalah bahwa resiliensi itu merupakan kemampuan dari individu atau komunitas dalam menghadapi gangguan atau kesulitan yang berasal dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan definisi komunitas sebagaimana dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa komunitas memiliki sifat yang unik dan cenderung memiliki kebutuhan, pengalaman, sumber daya, dan gagasan lokal mereka sendiri tentang pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap bencana. Setiap komunitas memiliki akses terhadap sumber daya mereka, serta kemampuan untuk memanipulasi dan membuat keputusan (Longstaff et al. 2010)

Definisi resiliensi komunitas, cukup sulit untuk dirumuskan, karena konsep tersebut bersifat multidisipliner, yang merentang dari disiplin ekologi hingga psikologi (Community and Regional Resilience Institute 2013). Namun, secara umum resiliensi komunitas dapat didefinisikan sebagai *the capability to anticipate risk, limit impact, and bounce back rapidly through survival, adaptability, evolution, and growth in the face of turbulent change* (Community and Regional Resilience Institute 2013). Resiliensi komunitas diartikan sebagai sejauh mana kemampuan komunitas untuk bisa bertahan dan beradaptasi untuk mengantisipasi serta merespons dari pesatnya perubahan sosial. Norris et al. (2007) menjelaskan resiliensi komunitas sebagai sebuah proses yang menghubungkan jaringan kapasitas adaptasi agar komponen atau unsur populasi dapat berfungsi dan beradaptasi dengan baik setelah terjadinya gangguan. Begitu juga Adger (2000) mendefinisikan resiliensi komunitas sebagai kemampuan dari kelompok-kelompok atau komunitas untuk mengatasi tekanan dan

gangguan eksternal yang muncul sebagai akibat dari adanya perubahan sosial, politik dan lingkungan.

Longstaff et al. (2010) menawarkan sebuah model untuk menilai resiliensi komunitas, yakni berdasarkan analisis ketahanan sumber daya (*resources robustness*) dan kapasitas adaptif (*adaptive capacity*). Ketahanan sumber daya (*resources robustness*) adalah faktor penting yang menentukan resiliensi komunitas, yakni seberapa jauh komunitas mampu memobilisasi sumber daya yang dimiliki untuk mengembalikan kehidupan seperti semula setelah mengalami guncangan akibat bencana. Komunitas dapat menilai ketahanan sumber daya yang mereka miliki melalui *performance*, *diversity* dan *redundancy*. Kapasitas adaptif merupakan kemampuan beradaptasi suatu komunitas terhadap bencana. Kapasitas adaptif suatu komunitas meliputi *institutional memory*, *innovative learning* dan keterhubungan (*connectedness*). Kapasitas adaptif (*adaptive capacity*) adalah kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan gangguan, dan mengatasi konsekuensi perubahan sosial yang terjadi. Boer et al. (2013) menyatakan bahwa indikator yang efektif untuk menunjukkan kemampuan adaptasi suatu komunitas adalah tingkat pendapatan perkapita dan kekuatan kelembagaan masyarakat.

Resiliensi komunitas juga bisa dipahami sebagai kemampuan adaptasi dengan mengembangkan sumber dayanya untuk mampu terus menyesuaikan dengan realitas kehidupan yang ada dimana selalu mengalami perubahan sosial yang penuh dengan ketidakmenentuan dan kesulitan untuk diprediksi (Magis 2010 dalam Permana 2016). Berkes dan Ross (2012) dalam Permana (2016) menjelaskan bahwa makna dari sumber daya yang bisa digunakan oleh komunitas sebagai kapasitas adaptasi untuk bertahan di antaranya keterhubungan antara orang dengan tempat tinggal, nilai dan kepercayaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, jaringan sosial, keterlibatan pemerintah (termasuk kolaborasi antarinstansi), inovasi ekonomi, infrastruktur, kepemimpinan dan pikiran yang terbuka.

Relasi sosial, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, merupakan bagian dari keterhubungan (*connectedness*) sebagai bagian dari kapasitas adaptif dalam resiliensi komunitas. Keterhubungan (*connectedness*) sebuah komunitas yang meliputi internal dan eksternal terlihat dari relasi sosial yang ada atau terjadi dalam komunitas. Relasi sosial yang mengarah pada persatuan (*assosiatif*) tentunya yang akan mempercepat terjadinya resiliensi

komunitas korban bencana alam. Semakin banyak dan bagus relasi sosial yang terbentuk akan semakin menguatkan jaringan sosial dan kohesi sosial di dalam komunitas sehingga komunitas yang mengalami bencana bisa cepat pulih keadaanya.

Resiliensi yang terjadi pada suatu komunitas menurut Maguire dan Cartwright (2008) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yakni resiliensi pada tingkatan stabilitas (*resilience as stability*), resiliensi pada tingkatan pemulihan (*resilience as recovery*) dan resiliensi pada tingkatan transformasi (*resilience as transformation*). Resiliensi komunitas pada tingkatan stabilitas (*resilience as stability*) dapat diartikan sebagai tingkatan kemampuan komunitas untuk bangkit dari keterpurukan akibat bencana, yang hanya mampu bertahan saja, namun belum mampu pulih seperti keadaan semula. Keadaan ini dilihat dari berapa jumlah bencana yang dapat ditoleransi atau diserap sistem sebelum beralih ke keadaan lain. Resiliensi komunitas pada tingkatan pemulihan (*resilience as recovery*) merupakan kemampuan komunitas untuk bangkit kembali dari keterpurukan akibat bencana sehingga bisa kembali pada keadaan semula. Resiliensi ini diukur dari waktu yang dibutuhkan untuk sebuah komunitas untuk pulih dari perubahan. Komunitas yang resilien adalah komunitas yang mampu kembali kepada keadaan semula relatif cepat, sedangkan komunitas yang kurang resilien membutuhkan waktu lebih lama atau bahkan tidak dapat pulih sama sekali. Resiliensi komunitas pada tingkatan transformasi (*resilience as transformation*) adalah komunitas sudah mampu menghadapi keterpurukan akibat bencana dan mampu meningkatkan kehidupannya sesudah bencana. Pada tingkatan ini, komunitas mampu untuk merespons perubahan akibat bencana secara adaptif, sehingga komunitas tidak hanya kembali pada keadaan seperti semula sebelum terjadinya perubahan, tetapi komunitas tersebut mampu melakukan pembaharuan sehingga keadaan komunitas tersebut menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Resiliensi komunitas juga dapat dilihat dari dua indikator, yakni indikator yang berkaitan dengan faktor ekonomi dan institusi maupun perubahan demografi di suatu wilayah Adger (2000). Faktor ekonomi dan institusi salah satu kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat stabilitas dan distribusi pendapatan diantara penduduk. Faktor lainnya adalah variabilitas lingkungan yang dapat dilihat pada sejauh mana penduduk bergantung pada sumber daya tertentu. Faktor lainnya adalah stabilitas mata pencaharian dan juga variable-variabel kultural.

Kategori indikator kedua adalah yang berkaitan dengan perubahan demografi di wilayah tersebut. Mobilitas dan migrasi merupakan serangkaian indikator yang berkaitan erat dengan resiliensi (Adger 2000).

Dalam konteks psikologi, Revich dan Shatte (2002) menyebutkan ada tujuh kemampuan yang membentuk resiliensi, yaitu regulasi emosi, pengendalian impuls, optimism, empati, causal analisis, efikasi diri dan *reaching out*. Pada dasarnya setiap individu sebagai bagian dari komunitas memiliki semua faktor resiliensi di atas, namun kemampuan individu untuk memanfaatkan potensi tersebut berbeda-beda. Setiap individu memiliki kemampuan berbeda untuk bertahan dalam kesulitan, serta mencegah hal-hal yang memicu stress dalam masa pemulihan sehingga bisa bangkit kembali.

Resiliensi Komunitas dalam Menghadapi Bencana

Dalam konteks kebencanaan, resiliensi komunitas merupakan mekanisme bertahan komunitas untuk mencapai standar hidup yang memadai pascabencana. Sebagai contoh, menurut Nuryani et al. (2011) dilakukannya relokasi bagi komunitas petani korban erupsi Gunung Merapi tahun 2010 diharapkan mampu mengembalikan kehidupan komunitas petani seperti semula. Pada tempat yang baru, komunitas petani diharapkan bisa resilien. Sebagaimana individu, komunitas juga memiliki kekuatan dan kelemahan dalam mengatasi permasalahan hidup dan mengusahakan keberlanjutan hidup.

Komunitas yang resilien adalah komunitas yang mampu merespons perubahan atau tekanan dengan cara yang positif dan mampu mempertahankan fungsi-fungsi sebagai sebuah komunitas. Intinya adalah komunitas mampu mengembalikan kondisi masyarakat yang berubah akibat terkena bencana alam kepada kondisi normal seperti sebelumnya. Sebab pada saat bencana terjadi, hampir seluruh tatanan kehidupan berubah, baik lingkungan fisik, sosial dan ekonomi sehingga orang tidak bisa menjalankan berbagai rutinitas seperti biasa.

Sejumlah studi mencoba untuk mencari faktor yang memengaruhi resiliensi di sejumlah daerah yang terdampak bencana alam (termasuk erupsi gunung berapi). Warohmah (2015) menyebutkan ada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi resiliensi responden terhadap erupsi Gunung Kelud. Faktor internal berasal dari diri responden (subyek) yang meliputi keyakinan diri, kesiapan serta pengendalian emosi. Sementara faktor

eksternal berasal dari dukungan dari keluarga dan masyarakat di sekitar subyek. Temuan lain yang cukup menarik dari studi ini adalah religiositas memberikan dampak positif terhadap resiliensi, semakin tinggi religiositas membuat subyek mampu menjadi pribadi yang resilien sehingga mampu bertahan, beradaptasi, serta kembali pada keadaan seperti sedia kala.

Studi yang dilakukan Dillashandy (2017) menyebutkan bahwa kapasitas adaptasi yang dimiliki komunitas pengungsi Gunung Merapi di lokasi penelitian tergolong tinggi karena pengetahuan dan pengalaman komunitas tergolong tinggi bencana erupsi Gunung Merapi beberapa kali terjadi. *Innovatove learning* komunitas tampak dari kemampuan komunitas memanfaatkan pasir untuk dijadikan lapangan pekerjaan, membangun wisata dan membangun tim pengurangan risiko bencana (PRB). Komunitas memiliki rasa tolong menolong karena merasa senasib sepenanggungan. Kapasitas adaptasi komunitas yang tinggi mewujudkan resiliensinya dalam bentuk transformasi. Komunitas dapat kembali berfungsi dengan baik dalam hal kualitas air, udara, kondisi lahan, pendapatan, kelembagaan, infrastruktur umum dan tingkat kenyamanan komunitas tergolong tinggi.

Dalam kasus bencana alam lainnya, Ardiyanto (2017) menemukan bahwa proses relokasi masyarakat rawan bencana (gempa bumi) di Gunung Kidul berjalan dengan lancar karena sejak awal melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah mufakat warga. Dengan partisipasi masyarakat, semua keinginan ataupun keluhan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Tahap relokasi dimulai dengan musyawarah, pemilihan lokasi yang aman dari bencana, pembuatan dan pemenuhan hak dasar masyarakat (papan dan pangan), dan rehabilitasi kondisi sosial ekonomi melalui klomnak, kelompok air dan kelompok tanai. Hasil relokasi adalah adanya perubahan fisik pemukiman masyarakat yang lebih baik. Pada aspek sosial dan ekonomi relokasi berdampak positif terhadap taraf hidup dan kondisi sosial masyarakat.

Hasil penelitian Utami (2018) menunjukkan bahwa dengan menggunakan empat komponen resiliensi komunitas yaitu: keterhubungan (*community connectedness*), risiko dan kerawanan (*risk and vulnerability*), ketersediaan sumber daya (*available resource*) serta prosedur dan perencanaan (*planning and procedure*) menunjukkan bahwa tingkat resiliensi komunitas di Kampung Cikoneng (Bogor) terhadap bencana longsor dan banjir tergolong cukup tinggi. Resiliensi tinggi karena

kemampuan masyarakat dalam berhubungan satu sama lain, kemampuan masyarakat dalam mengatasi risiko dan kerawanan, serta ketersediaan sumber daya dalam komunitas. Peran pemerintah belum begitu maksimal dalam penanggulangan risiko bencana dan masih bersifat reaktif daripada antisipatif.

Sementara Hartini (2017) melaporkan bahwa masyarakat di Bojonegoro (termasuk anak-anak) menunjukkan mereka mempunyai tingkat resiliensi yang baik. Warga mampu bersahabat dengan banjir dan mengubah kesulitan menjadi tantangan. Mereka memiliki semangat pantang menyerah serta nilai-nilai religiusitas. Warga mengembangkan pertanian buah belimbing dan mengembangkan wilayahnya menjadi agrowisata. Disamping itu, mereka mengajar kegotongroyongan kepada anak-anak sebagai pembelajaran hidup untuk menumbuhkan semangat saling membantu ketika ada bencana.

Studi Marseva et al (2016) mengungkapkan ada beberapa faktor yang memengaruhi resiliensi yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dari hasil panen sebelumnya, lama bertani dan dummy pekerjaan lain. Adaptasi yang dilakukan petani adalah dengan menggeser masa tanam, mengubah dan mengurangi dosis pupuk, mengubah benih, dan memiliki pekerjaan lain. Selain itu adaptasi juga dilakukan pada mata pencaharian dengan cara melakukan diversifikasi pekerjaan, yakni melakukan pekerjaan lain di bidang off farm dan non-farm.

RELOKASI KORBAN BENCANA ALAM DAN PERMASALAHANNYA

Relokasi merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dasar hukumnya mengacu pada Pasal 32 UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman dan/atau mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan perorangan atas suatu benda sesuai perundang-undangan. Relokasi atau pemindahan penduduk merupakan bagian dari program rehabilitasi pascabencana erupsi yang bertujuan mengurangi dampak bencana di masa yang akan datang dengan cara menjauhkan masyarakat dari sumber bencana.

Secara konseptual, Martanto dan Sagala (2014) menjelaskan bahwa relokasi adalah upaya pemindahan sebagian atau seluruh

aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan. Relokasi masyarakat korban bencana alam ataupun juga relokasi pemukiman, dalam perspektif sosiologis tidak semata-mata hanya sekedar memindahkan tempat tinggal secara fisik saja, namun di dalamnya meliputi juga pemindahan lingkungan secara sosial. Ada sistem sosial, ada pranata sosial yang melingkupi masyarakat juga turut serta dipindahkan mengikuti komunitas.

Gambaran kompleksnya program relokasi, terlihat dari keragaman tanggapan komunitas korban erupsi Gunung Merapi terhadap kebijakan relokasi terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Maarif et al. (2015). Di dalam penelitiannya, dalam menanggapi kebijakan relokasi, komunitas korban erupsi Gunung Merapi terbagi menjadi empat kelompok, yaitu (1) kelompok yang menerima relokasi secara mandiri, (2) kelompok yang menerima relokasi secara kolektif, (3) kelompok yang menerima relokasi dengan berbagai persyaratan dan (4) adalah kelompok yang menolak relokasi.

Menurut Gaillard (2008) dalam Martanto dan Sagala (2014) bahwa pemukiman kembali merupakan proses yang sangat kompleks, tidak sekedar membangun perumahan, namun lebih pada rekonstruksi sosial dari rumah, hubungan sosial dan politik serta mata pencaharian. Relokasi adalah menyangkut keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Boen dan Jigyasu (2005) dalam Martanto dan Sagala (2015) menyebut relokasi sebagai "*memindahkan jalan hidup*" yang berarti bahwa relokasi itu memindahkan tempat hidup manusia, lokasi pekerjaan, tempat bermain dan fungsi sosial lainnya. Sehingga kebijakan atau program relokasi membutuhkan kajian secara sosial, terutama dampak sosial yang dialami oleh individu atau komunitas yang direlokasi.

Program relokasi sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana, yakni memindahkan komunitas dari daerah rawan bencana ke daerah yang aman dari bencana, diharapkan juga mampu mengembalikan kehidupan komunitas seperti semula, bukan sebaliknya menjadi bencana baru bagi komunitas korban bencana. Relokasi yang berhasil akan mempercepat proses terjadinya resiliensi komunitas. Beberapa penelitian tentang keberhasilan program relokasi di antaranya adalah Aysan (1987) dalam Oliver-Smith (1991)

yang melakukan penelitian tentang keberhasilan program pemukiman kembali pasca bencana warga Muhipler dan Gediz setelah mengalami bencana gempa bumi. Menoni dan Pesaro (2008) dalam Martanto dan Sagala (2015) melihat keberhasilan program relokasi setelah kejadian luapan lumpur Sarno yang menewaskan hampir 200 orang pada tahun 1998 di daerah Gunung Alvano Pizzo di wilayah Campania.

Ardiyanto (2017) menemukan bahwa proses relokasi masyarakat rawan bencana (gempa bumi) di Gunung Kidul berjalan dengan lancar karena sejak awal melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah mufakat warga. Dengan partisipasi masyarakat, semua keinginan ataupun keluhan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Tahap relokasi dimulai dengan musyawarah, pemilihan lokasi yang aman dari bencana, pembuatan dan pemenuhan hak dasar masyarakat (papan dan pangan), dan rehabilitasi kondisi sosial ekonomi melalui kelompok ternak, kelompok air dan kelompok tanai. Hasil relokasi adalah adanya perubahan fisik pemukiman masyarakat yang lebih baik. Pada sepek sosial dan ekonomi relokasi berdampak positif terhadap taraf hidup dan kondisi sosial masyarakat.

Studi yang dilakukan oleh Romdon (2015) menjelaskan bagaimana proses rekonstruksi hunian tetap pasca bencana erupsi Gunung Merapi 2010 dengan mekanisme relokasi dilakukan. Ada tiga bentuk hunian hasil dari relokasi kolektif, yakni relokasi bedhol dukuh, relokasi campuran bedhol dukuh dan relokasi gabungan dari warga sebagian dukuh yang berbeda. Dari proses tersebut, terlihat bahwa relokasi yang bersifat kolektif relatif berhasil dilakukan. Mei et al. (2016) meneliti tentang kondisi aktual masyarakat korban erupsi merapi 2010 di dua wilayah hunian yang berbeda. Hasilnya adalah perkembangan hunian tetap (kawasan relokasi) selain dipengaruhi oleh kondisi kerusakan di daerah asal juga dari pekerjaan dan persepsi masyarakat terhadap program relokasi. Dari kedua penelitian ini terlihat bahwa persoalan relokasi bukan semata-mata pemindahan lokasi pemukiman, tetapi terkait dengan lingkungan sosial juga. Relokasi penduduk, baik dalam pengertian secara individual maupun kolektif bukanlah sebuah gejala sosial yang sederhana, namun juga melibatkan perubahan sosial pada level sistem sosial masyarakat yang kompleks. Perubahan sosial akan dihadapi oleh masyarakat yang terkena relokasi maupun daerah yang menjadi tujuan relokasi. Relokasi mempunyai pengaruh yang kuat pada proses dan struktur masyarakat.

Perpindahan tersebut dapat juga memotong ikatan-ikatan sosial yang signifikan dan dapat menyebabkan ketidak teraturan pola-pola sosial dimana individu itu berasal.

Selain relokasi yang berhasil, terdapat juga relokasi yang tidak berhasil, seperti dalam penelitian Usamah dan Haynes (2012) yang melihat terjadinya kegagalan pada program pemukiman kembali pasca meletusnya Gunung Mayon di Filipina. Masyarakat yang direlokasi kembali ke lokasi semula karena dampak sosial ekonomi yang mereka alami setelah berada di lokasi baru. Dalam kasus di Indonesia, kegagalan relokasi bagi korban bencana alam juga pernah dialami, yakni program relokasi perumahan warga Turgo pasca letusan Gunung Merapi tahun 1994 (Dove 2008 dalam Martanto dan Sagala 2014). Meskipun warga telah diberikan perumahan yang layak dan bantuan yang cukup besar namun warga kembali lagi ke kampung mereka di Turgo

Kegagalan program relokasi bagi korban bencana alam bisa disebabkan oleh beberapa hal. Hadi (2012) meneliti tentang dinamika yang terjadi di kawasan relokasi korban erupsi Gunung Merapi 1994 menemukan bahwa warga kesulitan mendapatkan pekerjaan di sekitar pemukiman relokasi, di sisi yang lain mereka masih memiliki tanah di Turgo (daerah asal mereka) yang masih bisa diolah untuk pertanian, tidak sedikit dari mereka yang kembali ke daerah asal mereka merupakan faktor penyebab terjadinya program relokasi pada saat itu. Warga yang tinggal di kawasan relokasi yang masih tersisa hanya tinggal 13 KK. Kembalinya warga yang direlokasi ke daerah asal mereka dan membangun kehidupan di tempat asal mereka yang pernah terkena bencana, selain menunjukkan kegagalan dari program relokasi, hal ini juga menunjukkan ketidakmampuan komunitas dalam beradaptasi (komunitas tidak resilien) dalam menjalani kehidupan baru di kawasan relokasi.

Diantara dampak program relokasi bagi korban bencana alam yang bisa menjadi 'bencana baru' bagi komunitas yang direlokasi adalah hilangnya sumber-sumber produktif termasuk lahan, hilangnya pendapatan dan mata pencaharian, menurunnya kultur budaya dan kegotong royongan yang ada dalam masyarakat (Amiany dan Sahay 2011). Kehilangan aset sumber-sumber produktif tersebut menuntut komunitas petani untuk bisa melakukan adaptasi sosial ekonomi di tempat yang baru. Menjalani kehidupan yang baru di kawasan relokasi, berarti warga komunitas harus mampu menyesuaikan diri dengan

lingkungan baru sekaligus membangun kehidupannya kembali agar kehidupan komunitas bisa berlanjut di kawasan relokasi. Martanto dan Sagala (2014) mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada program relokasi: masalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, masalah yang berhubungan dengan lokasi baru, masalah yang berhubungan dengan adaptasi, masalah yang berhubungan dengan sumber penghidupan, masalah yang berhubungan dengan hak milik.

Permukiman kembali (*resettlement*) memiliki risiko bagi kelompok masyarakat yang harus berpindah, tidak semata persoalan individu namun juga pada sistem sosial yang berlaku di masyarakat (Pujiriyani 2014). Lebih lanjut Pujiriyani (2014) menjelaskan bahwa dampak dari pemukiman kembali sangat besar, di antaranya dapat merusak mode produksi dan cara hidup, memengaruhi kekerabatan dan organisasi dan jaringan sosial, menimbulkan persoalan lingkungan dan kemiskinan, mengancam identitas kultural kelompok etnik.

Harvey (2011) dalam Pujiriyani (2014) menyebutkan beberapa persoalan yang bisa muncul akibat permukiman kembali antara lain; konflik dan perpecahan akibat persaingan untuk memperoleh keuntungan dari pemukiman yang baru; kesulitan untuk mengakses sumber daya alam yang sebelumnya aksesibel serta kerawanan pangan; terbatasnya akses pada infrastruktur publik, pelayanan dan berbagai fasilitas sosial; hilangnya sumber penghidupan; kualitas kehidupan yang semakin memburuk (kemiskinan); serta depresi dan tekanan psikologis. Cernea (1996) dalam Martanto dan Sagala (2015) menyebutkan bahwa pemukiman kembali bisa menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap penduduk yang dimukimkan kembali melalui beberapa faktor, yaitu : 1) hilangnya perumahan dan tanah serta kurangnya sanitasi, 2) penurunan kualitas pendidikan dan kesempatan kerja, 3) gangguan pada jaringan dukungan sosial, 4) hilangnya aset budaya. Begitu juga Oliver-Smith (1991) menyebutkan di antara bentuk kegagalan dari permukiman kembali korban bencana alam adalah seperti kehilangan hak milik atas tanah, tempat tinggal, kehilangan pekerjaan/mata pencaharian, kekurangan pangan, penurunan status sosial, hilangnya, kepercayaan dalam antarmasyarakat, penurunan kesehatan dan jumlah kematian, hilangnya komunikasi sosial, kehilangan akses barang dan jasa, akses milik umum dan milik masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengalaman dari keberhasilan dan kegagalan relokasi seperti

yang sudah disebutkan sebelumnya, maka relokasi yang bisa mendukung komunitas untuk resilien atau bisa bertahan dan kembali pada keadaan sesudah bencana dan tidak menjadi bencana baru bagi komunitas yang direlokasi adalah relokasi yang mempertimbangkan beberapa indikator seperti yang dikemukakan dalam penelitian Mei et al. (2016), yakni menggunakan tujuh indikator untuk mengetahui penilaian anggota komunitas korban erupsi merapi selama tinggal di kawasan relokasi, indikator tersebut meliputi jarak dari rumah (tempat relokasi) ke tempat kerja, keamanan dari bahaya gunung berapi, ukuran rumah, kondisi bangunan, kondisi lingkungan, komunalitas/jaringan sosial antartetangga, keberadaan fasilitas dan infrastruktur.

PENUTUP

Relasi sosial yang bersifat menguatkan ikatan (asosiatif) dalam sebuah komunitas merupakan salah satu bagian dari kapasitas adaptif komunitas yang akan memberikan dampak yang positif bagi tumbuh kembangnya resiliensi komunitas dalam menghadapi perubahan akibat kejadian bencana alam. Dalam situasi yang lebih spesifik, seperti pada komunitas di daerah relokasi, situasinya mungkin akan bertambah kompleks jika antar-anggota komunitas tidak memiliki persamaan, seperti kesamaan nilai, budaya ataupun tujuan. Selain kemampuan adaptasi, adanya kohesi sosial dalam komunitas dan antarkomunitas juga memberikan dukungan bagi komunitas untuk kembali pada kehidupan "normal". Paper ini secara umum memberikan kontribusi pengetahuan seputar kehidupan komunitas korban bencana alam (khususnya gunung berapi) di kawasan relokasi.

Pengetahuan tentang seputar proses yang terjadi di kawasan relokasi bagi korban erupsi di kawasan relokasi dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan, terutama dalam pengembangan dan pemberdayaan kawasan relokasi dan juga program relokasi bagi komunitas petani. Pada hakekatnya, relokasi sebagai suatu kegiatan atau program dalam rangka mengurangi korban terdampak bencana tidak semata-mata terbatas pada pemindahan tempat tinggal suatu masyarakat. Namun, lebih jauh meliputi juga sistem penghidupan dan sistem sosial sebuah komunitas yang diharapkan terus berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang terdampak bencana dan masyarakat sekitar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada (1) Dr. Nurmala K Pandjaitan, MS.Dea yang telah memberikan inspirasi sekaligus membimbing dalam penulisan makalah ini, (2) Dr. Ir. Saharuddin, M.Si atas segala saran dan kritikan untuk makalah ini, (3) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang telah memfasilitasi penulisan makalah ini, (4) Dewan Redaksi dan Mitra Bestari FAE serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga penulisan makalah ini bisa diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger W N . 2000. Social and ecological resilience: are they related?. *Progress in Human Geography*. 24(3):347-364.
- ADPC. 2006. Hazard, vulnerability and risk. Workshop on Earthquake Vulnerability Reduction for Cities and Damage Loss Estimation for Recovery Planning Research Center for Disaster Studies; 2006 28 Aug-01 Sep; Yogyakarta, Indonesia
- Amiany, Sahay NS. 2011. Kajian permukiman kembali penduduk tepian sungai kahayan di kota palangka raya. *Jurnal Arsitektur*. 06(01): 44-51
- Alvord MK, Grados JJ. 2005. Enhancing resilience in children. A proactive approach. *Profesional Psychology: Research & Practic* 36 (3): 338-345.
- Ardiyanto. 2017. Relokasi Masyarakat rawan bencana: studi tahap relokasi di Dusun Blado, Giritirto, Purwosari, Gunung Kidul [Skripsi]. [Yogyakarta(ID)]: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Boer R, Faqih A, Ardiansyah M, Kolopaking L, Rakhman A, Nurbaeti B, Perdinan, Febriyanti S, Jatmiko SD, Anria A. 2013. Rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kerangka pengelolaan sumber daya air di das Citarum di Kabupaten Bandung Barat. Bandung (ID): Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLH) Kabupaten Bandung Barat
- CARRI. 2013. Definitions of community resilience: an alanysis. *Community and Regional Resilience Institute*
- Demakota CM, Wangke MW, Baroleh J. 2017. Interaksi sosial transmigran desa werdhi agung dengan penduduk asli Desa Ibolian di Kecamatan Dumoga Tengah. *Agri-Sosio Ekon Unsrat*. 13(1A): 239-252.
- Dibiyosaputo S, Cahyadi A, Nugraha H, Suprayogi S. 2016. Estimasi dampak perubahan iklim terhadap kerawan banjir lahar di Magelang, Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS ;2016*

- Juni 4; Solo, Indonesia. Solo (ID): Muhammadiyah University Press.
- Dillashandy, N. A. 2017. Kapasitas adaptasi dan resiliensi komunitas menghadapi bencana erupsi gunung merapi (kasus: Dusun Kalitengah lor, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman) [Skripsi]. [Bogor(ID)]: Institut Pertanian Bogor.
- Dugan T & Coles R.1991. The child in over time. *Studies in the development of resiliency. Journal of Traumatic Stress* 4 (3): 458.
- Gallopini GC. 2006. Linkage between vulnerability, resilience, and adaptive capacity. *Global Environmental Change*.16: 293-303.
- Hadi IP. 2012. Dinamika Permukiman Relokasi Turgu di Dusun Sudimoro, Makalah Seminar Nasional Sustainable Urbanism; 2012 Maret 13; Semarang, Indonesia. Semarang(ID): Biro Penerbit Planologi Universitas Diponegoro.
- Hartini, N. 2017. Resiliensi warga di wilayah rawan banjir di Bojonegoro. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 30(2): 114-120.
- Hasyim AF. 2015. Agama dan lokalitas: harmoni sosial berbasis agama dan kearifan lokal di Desa Sampetan Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Wahana Islamika*. 1(01):1-18.
- Khadijah S. 2015. Komunikasi, kohesivitas dan pembentukan identitas di kalangan komuter berkereta api (kasus : kereta api patas purwakarta) [Tesis]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor
- Kulig JC, Edge DS, Joyce B. 2008. Understanding community resiliency in rural communities through multidimethod research. *J of Rural and Community Develop*. 3(3):77-94
- Layendecker L. 1983. *Tata, perubahan,dan ketimpangan: suatu pengantar sejarah sosiologi*. Jakarta (ID): PT Gramedia
- Longstaff PH, Amstrong NJ, Perrin K, May W. 2010. Building resilient communities: a preliminary framework for assessment. *Homeland Security Affairs* 6(3) : 1-23.
- Maarif S, Pramono R, Sunarti E. 2015. Kapital sosial dalam relokasi permukiman pasca erupsi merapi. *J Riset Kebencanaan Indonesia*. 1(1):1-10
- Maguire B, Cartwright S. 2008. Assessing a community's capacity to manage change: a resilience approach to social assessment. *Social Science Program*. Canberra (AU): Australian Government Bureau of Rural Science.
- Marfai MA, Hadmoko DS, Cahyadi A, Sekaranom AB. 2012. Sejarah letusan gunung merapi berdasarkan fasies gunung api di daerah aliran sungai bedog, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Riset Geologi dan Pertambangan*, 22 (2): 73-74.
- Marseva AD, Putri EIK, Ismail A. 2016. Analisis faktor resiliensi rumah tangga petani dalam menghadapi variabilitas iklim. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 17(1): 15-27.
- Martanto F, Sagala SA. 2014. Faktor-faktor yang memengaruhi persoalan relokasi pasca bencana lahar dingin di kali putih. *J Perencanaan Wilayah dan Kota*. 27(02): 137-150.
- McMillan DW, Chavis DM. 1986. Sense of community a definition and theory. *J of Community Psychology*. 14(1): 6-23.
- Meiarti R, Wardhana GMK, Masruroh H, Setiawan B, Hastuti AE. 2016. Kajian hunian tetap terhadap pengurangan risiko dan penataan ruang pasca erupsi gunungapi merapi 2010. Di dalam Sudibyakto HA, Kurniawan L, editor. *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan Ke II; 2015 Mei 26-28; Yogyakarta, Indonesia*. Bogor (ID): Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. hlm 110-119.
- Mei ETW, Fajarwati A, Hasanati S, Sari IM. 2016. Resettlement following the 2010 Merapi Volcano eruption. Di dalam: *Procedia. CITIES 2015 International Conference, Intelligent Planning Towards Smart Cities, Surabaya, 2015 Nov 3-4; Surabaya, Indonesia. Procedia-Social and Behavioral Science* 227 : 361-369
- Mutakin, Pasya GRK. 2003. *Dinamika masyarakat Indonesia*. Jakarta (ID): Departemen Pendidikan Nasional.
- Myers DG. 2012. *Psikologi sosial*. Jakarta(ID): Salemba Humanika.
- Nasdian FT. 2006. *Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta(ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nisa A, Juneman. 2012. Peran mediasi persepsi kohesi sosial dalam hubungan prediktif persepsi pemanfaatan ruang terbuka publik terhadap kesehatan jiwa. *Jurnal Makara Sosial Humaniora*.16(2): 89-100.
- Norris FH, Stevens SP, Pfefferbaum B, Wyche KF, Pfefferbaum RL. 2007. Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster. *Journal of Community Psychology*. 41: 127-150.
- Nuryani S, Maaz A, Darmanto R, Jayadi E, Martono, Benito HR, Kusumandari A, Gatot M, Marwasta D, Jamhari, Kastono D. 2011. Dampak dan mitigasi bencana akibat erupsi merapi 2010. *Symposium Gunung Merapi dan Kajian Perilaku; 2011 Feb 21; Yogyakarta, Indonesia; Yogyakarta (ID): Pusat Studi Sumber daya Lahan Universitas Gadjah Mada*.
- Oliver-Smith A. 1991. Post disaster housing reconstruction and social inequality: a challenge to policy and practice. *Disaster*.14 (1):7-19.
- Panjaitan NK, Adriana G, Virianita R, Karlita N, Cahyani RI. 2016. Kapasitas adaptasi komunitas pesisir pada kondisi rawan pangan akibat perubahan iklim (kasus sebuah komunitas nelayan di Jawa Barat). *J Sodality*. 4(3): 281-290.

- Permana YS. 2016. Mampukah subak bertahan? Studi kasus ketahanan sosial komunitas subak Pulagan, Gianyar Bali. *Masyarakat Indonesia* 42(2): 219-232.
- Pujiriyani DW. 2014. Pengadaan tanah dan problem permukiman kembali: skema pemberdayaan untuk perlindungan masyarakat terdampak. *J Bhumi*. 40(13): 633-648.
- Ramadhan A, Purnomo AH, Suryawati SH, Firdaus M. 2015. Kapasitas adaptif institusi formal pengelola kawasan perairan dalam mendukung resiliensi sosial ekosistem terumbu karang. *J Sosek KP* 10(2): 159-176.
- Reivich K, Shatte A. 2002. *The resilience factor: 7 essential skills for overcoming life's inevitable obstacles*. Random House, Inc. New York.
- Romdon M. 2015. Rekonstruksi hunian tetap pasca bencana: studi kasus hunian tetap relokasi pasca bencana di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman [Tesis]. [Yogyakarta(ID)]: Universitas Gadjah Mada
- Schiraldi GR. 2009. *The post traumatic stress disorder sourcebook: Second Edition*. USA: The McGrawHill Companies, Inc. (Ebook).
- Soekanto S. 2010. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta(ID): Raja Grafindo Persada.
- Soelaeman M. 2011. *Ilmu sosial dasar teori dan konsep Ilmu sosial*. Bandung (ID): PT Refika Aditama
- Spradley, Mc Curdy. 1975. *Cultural experience, ethnography in complex society*. Chicago:Science Research Association.
- Sumarti T. 2015. Interaksi dan struktur sosial. Di dalam: Nasdian FT, Editor. *Sosiologi Umum*. Jakarta(ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sujarwanto I. 2012. Interaksi sosial antar umat beragama (studi kasus pada masyarakat Karangmalang Kedungbanteng Kabupaten Tegal). *J of Education Soc Studies*. 1(2): 60-65
- Suprianto DH. (2012). Adaptasi sosial pengungsi erupsi gunung Merapi di hunian sementara (huntara) jengjala dusun Plosokerep desa Umbulharjo kecamatan Cangkringan kabupaten Sleman [Skripsi]. [Yogyakarta(ID)]: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Usamah M, Haynes K. 2012. An examination of the resettlement program at Mayon Volcano : what can we learn for sustainable volcanic risk reduction?. *Bull Volcanol*. 74: 839-859.
- Utami PN. 2018. Peran pemerintah dan resiliensi komunitas dalam menghadapi bencana (kasus Kampung Cikoneng, Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor) [Skripsi]. [Bogor(ID)]:Institut Pertanian Bogor.
- Van Breda AD 2001. *Resilience theory: a literature review*. Pretoria (ZA): South African Military Health Service, Military Psychological Institute.
- Warohmah M. 2016. Dinamika resiliensi pada penyintas bencana erupsi gunung kelud [Skripsi]. [Yogyakarta(ID)]: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Wibowo. 2006. *Manajemen perubahan*. Jakarta (ID): Raja Grafindo.
- Yuasidha NR. 2014. Kohesivitas penduduk asli dan pendatang dalam multikulturalisme. *J Online Sosiologi Fisip Unair Komunitas*. 3(01): 1-35.
- Bawole Paulus. 2015. Program Relokasi permukiman berbasis masyarakat untuk korban bencana alam letusan gunung merapi tahun 2010. *J Tesa Arsitektur*. 13(2):114-127
- Pandia SL, Rachmawati R, Mei ETW. 2016. Relokasi permukiman desa suka meriah akibat kejadian erupsi gunung api sinabung Kabupaten Karo, J Perenc Wil dan Kota. 2(2): 137-150. DOI:10.5614/jrep.2016.27.2.5. <http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwwk/article/view/1954> diunduh tanggal 6 Februari 2018.